

Perpektif Masyarakat terhadap Politik Uang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten di Enrekang: *Telaah Konstruksi Nilai-Nilai Pendidikan Islam*

Baharuddin, Masyar, Elihami

Baharuddinbazznas530@gmail.com

Masyar@iain.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif masyarakat Kabupaten Enrekang terhadap praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan bagaimana pendidikan agama Islam dapat berperan dalam mengurangi dampak negatif politik uang. Politik uang merupakan salah satu fenomena yang mengancam kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada, di mana pemilih seringkali memilih calon pemimpin berdasarkan imbalan materi. Berdasarkan telaah terhadap konstruksi nilai-nilai pendidikan Islam, seperti amanah, adil, dan tanggung jawab sosial, penelitian ini mengidentifikasi peran pendidikan Islam dalam membentuk kesadaran politik masyarakat untuk memilih berdasarkan kualitas dan integritas pemimpin, bukan berdasarkan keuntungan materi. Meskipun masyarakat Enrekang menyadari bahwa politik uang bertentangan dengan ajaran Islam, praktik ini masih berlangsung karena faktor ketergantungan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan politik, dan kuatnya budaya politik patronase. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik politik di Kabupaten Enrekang, termasuk rendahnya kesadaran politik dan keterbatasan akses terhadap pendidikan agama dan politik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam mengurangi politik uang, tantangan yang ada memerlukan upaya yang lebih besar dalam memperkuat kesadaran politik masyarakat dan menyediakan lebih banyak contoh pemimpin yang berintegritas.

Kata kunci: Politik uang, Pemilihan Kepala Daerah, Pendidikan Islam, Nilai-nilai Islam, Kabupaten Enrekang, Demokrasi

Abstract

This study aims to examine the perspective of the people of Enrekang Regency on the practice of money politics in the Regional Head Election (Pilkada) and how Islamic religious education can play a role in reducing the negative impacts of money politics. Money politics is one of the phenomena that threaten the quality of democracy in Indonesia, particularly in the context of Pilkada, where voters often choose candidates based on material rewards. Based on a review of the construction of Islamic education values such as trust (*amanah*), justice (*adil*), and social responsibility, this study identifies the role of Islamic education in shaping political awareness

among the community to choose leaders based on quality and integrity, rather than material benefits. Although the people of Enrekang are aware that money politics contradicts Islamic teachings, this practice persists due to factors such as economic dependence, low levels of political education, and the strong culture of patronage politics. This study also identifies the challenges faced in applying Islamic values in political practice in Enrekang Regency, including low political awareness and limited access to religious and political education. The findings show that although Islamic education has great potential in reducing money politics, the existing challenges require greater efforts to strengthen political awareness and provide more examples of leaders with integrity.

Keywords: Money politics, Regional Head Election, Islamic Education, Islamic Values, Enrekang Regency, Democracy

I. Pendahuluan

Politik uang adalah fenomena yang sering ditemukan dalam pemilihan umum, termasuk pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Enrekang. Praktik politik uang ini melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka, sehingga pemilihan pemimpin tidak lagi didasarkan pada kapasitas, visi, dan integritas calon pemimpin, melainkan pada keuntungan materi yang diterima pemilih dalam jangka pendek. Fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan keadilan, partisipasi aktif, dan pilihan berdasarkan pertimbangan rasional yang mengutamakan kepentingan umum.

Di Kabupaten Enrekang, praktik politik uang masih menjadi tantangan besar yang mempengaruhi kualitas pemilu dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Masyarakat, terutama di daerah pedesaan, terkadang terjebak dalam situasi yang memaksa mereka untuk menerima imbalan materi demi mendapatkan bantuan finansial yang seringkali dianggap sebagai kebutuhan dasar. Hal ini menciptakan dilema, di mana banyak pemilih yang cenderung mengutamakan keuntungan pribadi tanpa menyadari bahwa tindakan mereka dapat merugikan masa depan daerah dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menghadapi permasalahan ini, pendidikan Islam menawarkan perspektif yang dapat menjadi solusi untuk memperbaiki budaya politik dan meningkatkan kualitas pemilih. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga memberikan nilai-nilai moral dan etika yang sangat relevan dengan kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Nilai-nilai seperti *amanah* (kepercayaan), *adil* (keadilan), dan *tanggung jawab sosial* menjadi

pedoman yang dapat membentuk perilaku politik yang lebih jujur, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan umum daripada keuntungan pribadi.

Penting untuk menganalisis bagaimana perspektif masyarakat Enrekang terhadap praktik politik uang dan sejauh mana nilai-nilai pendidikan Islam dapat diterapkan dalam memperbaiki pola pikir serta perilaku politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat Kabupaten Enrekang terhadap praktik politik uang dalam Pilkada dan menilai bagaimana pendidikan Islam, dengan nilai-nilainya yang luhur, dapat menjadi instrumen untuk menciptakan pemilih yang lebih cerdas, bertanggung jawab, dan tidak terjebak dalam politik uang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperbaiki sistem politik di Kabupaten Enrekang dan meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali perspektif masyarakat Kabupaten Enrekang terhadap praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan untuk mengkaji peran konstruksi nilai-nilai pendidikan Agama Islam dalam membentuk perilaku politik yang lebih baik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan, sikap, dan pengalaman subjektif masyarakat terkait dengan praktik politik uang dan bagaimana pendidikan Islam dapat mengubah pandangan tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah **penelitian deskriptif kualitatif**, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena politik uang serta peran pendidikan Islam dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks sosial dan budaya masyarakat Enrekang yang terkait dengan praktik politik uang serta nilai-nilai Islam yang mungkin berperan dalam mengatasi masalah tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang, yang terletak di Sulawesi Selatan. Kabupaten Enrekang dipilih sebagai lokasi penelitian karena praktik politik uang dalam Pilkada masih berlangsung meskipun telah ada upaya untuk memberantasnya. Selain itu,

faktor budaya dan pengaruh agama yang kental di daerah ini menjadikannya sebagai tempat yang relevan untuk mengeksplorasi kontribusi pendidikan Islam dalam membentuk perilaku politik masyarakat.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**, yang berarti memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari:

- **Masyarakat Pemilih:** Pemilih yang berpartisipasi dalam Pilkada di Kabupaten Enrekang, dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan.
- **Tokoh Agama:** Ulama dan guru agama yang memiliki pengaruh dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap politik dan ajaran agama Islam.
- **Praktisi Politik:** Politisi lokal atau calon kepala daerah yang terlibat dalam Pilkada di Kabupaten Enrekang, untuk mendapatkan pandangan dari sisi praktisi politik.
- **Pendidikan Islam:** Pengajar atau dosen yang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai pendidikan Islam dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik.

Jumlah informan dalam penelitian ini diperkirakan sekitar 20-30 orang, yang dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang relevan dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik, di antaranya:

- **Wawancara Mendalam:** Wawancara dilakukan dengan informan terpilih untuk menggali pandangan, sikap, dan pemahaman mereka terkait politik uang dalam Pilkada, serta peran pendidikan Islam dalam membentuk perilaku politik yang lebih baik. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel agar informan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan mendalam.
- **Observasi:** Peneliti melakukan observasi terhadap perilaku masyarakat di lingkungan sekitar pemilihan dan melihat bagaimana masyarakat merespons praktik politik uang. Observasi juga dilakukan terhadap kegiatan keagamaan atau pendidikan yang berkaitan dengan ajaran Islam dalam masyarakat setempat.

- **Studi Dokumentasi:** Peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan hasil Pilkada sebelumnya, peraturan terkait politik uang, dan dokumen yang menjelaskan kebijakan atau program pendidikan agama Islam di Kabupaten Enrekang.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan **analisis tematik**. Proses analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Langkah-langkah analisis yang dilakukan meliputi:

- **Pengkodean Data:** Proses pengkodean dilakukan dengan menandai bagian-bagian dari data yang relevan dengan topik penelitian, seperti pandangan masyarakat terhadap politik uang dan pengaruh pendidikan Islam.
- **Penyusunan Tema:** Data yang telah dikodekan kemudian dikelompokkan dalam tema-tema utama, seperti "politik uang dalam Pilkada", "pengaruh agama dalam politik", dan "nilai-nilai Islam dalam pendidikan politik".
- **Interpretasi:** Setelah tema-tema teridentifikasi, peneliti akan menginterpretasikan data dengan menghubungkan tema-tema tersebut dengan teori-teori yang relevan, seperti teori demokrasi, etika politik Islam, dan nilai-nilai pendidikan Islam.

6. Validitas dan Reliabilitas

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan **triangulasi data**, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan studi dokumentasi) untuk memeriksa konsistensi temuan. Selain itu, peneliti juga melakukan **member check**, yaitu dengan meminta umpan balik dari informan terkait hasil wawancara untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan perspektif mereka dengan akurat.

7. Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, yaitu:

- **Informed Consent:** Peneliti memberikan penjelasan yang jelas kepada informan mengenai tujuan penelitian dan meminta persetujuan mereka sebelum wawancara atau observasi dilakukan.

- **Kerahasiaan:** Identitas informan akan dirahasiakan dan data yang terkumpul hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini.
 - **Non-Keberpihakan:** Peneliti berusaha untuk bersikap objektif dan tidak mempengaruhi pandangan informan dalam proses wawancara atau observasi.
-

IV. Hasil Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif masyarakat Kabupaten Enrekang terhadap praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan menganalisis kontribusi pendidikan agama Islam dalam membentuk perilaku politik yang lebih baik. Berdasarkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang dilakukan, ditemukan beberapa temuan utama yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap politik uang dan peran nilai-nilai pendidikan Islam dalam menyikapi masalah tersebut.

4.1. Pandangan Masyarakat Enrekang terhadap Politik Uang

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Enrekang mengakui bahwa politik uang merupakan fenomena yang sulit untuk dihindari dalam Pilkada. Banyak pemilih yang menganggap politik uang sebagai praktik yang sudah biasa terjadi dan bahkan menjadi bagian dari dinamika pemilu. Mayoritas masyarakat, terutama di daerah pedesaan, merasa bahwa imbalan materi yang diberikan oleh calon kepala daerah adalah cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mereka cenderung memilih calon yang memberikan uang atau barang, meskipun mereka tahu hal tersebut tidak ideal.

Dalam wawancara dengan beberapa pemilih, mereka mengungkapkan bahwa mereka sadar akan dampak buruk politik uang terhadap kualitas pemilu, namun mereka merasa terpaksa menerima tawaran tersebut karena tekanan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pada bantuan finansial dari calon pemimpin sebagai cara untuk mengatasi kesulitan ekonomi jangka pendek. Salah seorang informan menyatakan, "Kami tahu ini salah, tapi bagaimana lagi, kalau tidak dapat bantuan, hidup kami susah."

Namun, ada juga kelompok masyarakat yang mulai menentang praktik politik uang dan lebih memilih untuk memilih calon yang mereka anggap memiliki kapasitas dan visi untuk memajukan daerah, meskipun tidak memberikan uang atau barang. Kelompok ini umumnya

berasal dari kalangan yang lebih terdidik dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak jangka panjang dari politik uang terhadap pembangunan daerah.

4.2. Pendidikan Islam sebagai Solusi terhadap Politik Uang

Banyak temuan dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai pendidikan agama Islam telah di ajarkan di sekolah-sekolah, bahkan di libatkan dalam kampanye anti politik uang. Dalam kurikulum Pendidikan Islam, secara umum termuat pelajaran tentang *amanah* (kepercayaan), *adil* (keadilan), dan *tanggung jawab* (responsibility), dapat menjadi solusi dalam mengatasi praktik politik uang di Kabupaten Enrekang.

Tokoh agama dan lembaga pendidikan agama di Kabupaten Enrekang memainkan peran yang sangat penting dalam menanggulangi money politik.

Berdasarkan hasil wawancara,:

- Ketua MUI Enrekang KH.Amir Mustafa, Kami secara kelembagaan di libatkan dalam hal kampanye anti maney Politik oleh penyelenggara pemilu di Enrekang, contohnya kami diminta membuatkan hutbah seragam tentang pemilu jujur ,bahaya maney politik, di pengajian-pengajian, ceramah-cerama kami aktif membawakan materi bahaya maney politik, pemimpin jujur dan Amanah‘ serta pentingnya memilih pemimpin yang berdasarkan kualitas moral dan keadilan. Melalui pengajaran ini, masyarakat diharapkan untuk lebih menyadari bahwa memberikan suara berdasarkan uang atau materi bertentangan dengan ajaran Islam.
- Habibi Rahman (Ketua asosiasi Guru Agama Islam Kabupaten Enrekang),” tidak ada spesipik ayat-ayat dan hadis-hadis di bahas dalam pembelajaran disekolah-sekolah, tapi secara umum terkaper materi-materi pembahasan akhlak meliputi akhlak baik dan akhlak buruk antara lain bahaya maney politik, kami menyarankan perlunya penguatan kurikulum yang lebih mengintegrasikan ajaran-ajaran moral terkait politik dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah. Pembelajaran PAI di SMP hanya 10-20 % tentang akhlak dan di SMA 15-25% dalam pembelajaran dan praktek dalam kehidupan.” Kami mendorong agar penguatan kurikulum di lakukan penyesuain dan penguatan ayat-ayat dan hadis-hadis kontekstual kaitan maney politik, nilai kejujuran , pemimpin Amanah dalam kehidupan

- Muh.Irfan Guru SMPN 1 Enrekang Mengemukakan : di kurikulum SMP, materi akhlak di bahas Bab akhlak,etika Islam dan hukum islam,larangan mengambil hak orang lain, volumenya 1-2 kali pertemuan dalam satu pekan. Hadis -hadis yang sering di bahas HR Abu daud (3580) tentang Rusywa/Suap, HR Muslim tentang penguasa yang adil.HR Buhari tentang Amanah “
- Husain Kamaruddin Mudir, Pesantren Darul Arqam Cece dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Enrekang : “Sejauh pengamatan kami pembejaraan materi ayatayat dan hadist masih sangat terbatas dalam pembelajaran PAI , bahkan jika peserta didik di evaluasi tidak ada hafalan hadist terkait dalam 1-2 semester, pemberian materi hadist umum saja masih sangat terbatas dan bersifat formalitas, guru membacakan dan mengartikan saja , perlunya pendalaman , mengenalkan sejak dini hadist-hadist tentang suap,Amanah, kepemimpinan.kejujuran, prilaku politik dan lainnya.. Korelasi pembelajaran hadist-hadist terhadap sikap dan prilaku masyarakat, makin banyak membahas hadist akan berpengaruh pada prilaku baik pada masyarakat”
- Ambo Tuo, Kepala Sekolah MAN 1 Enrekang : Kami sangat aktif bekerjasama dengan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu dalam Gerakan anti politik uang, lomba, simulasi dalam pemilihan OSIS tentang politik jujur,Amanah dan bersih dari maney politik. Kami mendukung penguatan kurikulum di lakukan penyesuain dan penguatan ayat-ayat dan hadis-hadis kontekstual kaitan maney politik, nilai kejujuran , pemimpin Amanah dalam kehidupan.

"Islam mengajarkan kita untuk memilih pemimpin berdasarkan keadilannya, bukan berdasarkan uang yang dia berikan." Nilai *amanah* ini mendorong masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan komitmen mereka dalam melayani masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi sesaat.

Nilai *adil* (keadilan) juga menjadi salah satu aspek penting yang ditekankan dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus bertindak adil dalam segala hal, termasuk dalam memilih pemimpin. Masyarakat yang memahami konsep keadilan ini akan lebih cenderung untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kemaslahatan bagi banyak orang dan tidak terpengaruh oleh tawaran politik uang yang bersifat sementara.

Selain itu, pendidikan Islam juga mengajarkan pentingnya *tanggung jawab sosial*, di mana setiap individu memiliki peran dalam menjaga keutuhan dan kemajuan masyarakat. Dalam

konteks ini, pemilih diharapkan untuk bertanggung jawab dalam memilih pemimpin yang dapat memajukan daerah dengan cara yang adil dan transparan. Pemilih yang memiliki pemahaman ini akan lebih memilih calon yang tidak hanya menawarkan imbalan materi, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk kemajuan daerah.

4.3. Tantangan dalam Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Demokrasi

Meskipun banyak masyarakat Enrekang yang memahami nilai-nilai pendidikan Islam, tantangan terbesar dalam penerapannya adalah rendahnya kesadaran politik dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih terbatas. Banyak pemilih yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana memilih pemimpin yang baik menurut prinsip-prinsip Islam, dan lebih fokus pada keuntungan finansial yang langsung mereka dapatkan. Selain itu, adanya ketimpangan sosial-ekonomi yang cukup besar menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih mengutamakan bantuan materi ketimbang pertimbangan jangka panjang.

Pendidikan agama Islam yang diberikan di sekolah-sekolah dan melalui ceramah agama belum sepenuhnya berhasil menanamkan kesadaran politik yang baik. Beberapa tokoh agama mengungkapkan bahwa meskipun nilai-nilai Islam telah disampaikan dalam berbagai kesempatan, implementasi nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih terbatas. Hal ini terjadi karena pengaruh budaya lokal yang lebih mengutamakan keuntungan materi dan pragmatisme politik.

Namun, ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan dan tokoh agama setempat untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang amanah dan adil, yang dapat mengurangi pengaruh politik uang. Misalnya, beberapa pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Enrekang mengadakan pelatihan politik berbasis nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

4.4. Peran Tokoh Agama dalam Membentuk Persepsi Politik Masyarakat

Tokoh agama di Kabupaten Enrekang memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk persepsi politik masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan tokoh agama untuk mendapatkan panduan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal memilih pemimpin. Tokoh agama yang memiliki pemahaman yang baik mengenai ajaran Islam tentang politik dapat membantu mengarahkan masyarakat untuk

memilih calon kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bukan berdasarkan imbalan materi.

Meskipun demikian, pengaruh tokoh agama dalam menanggulangi politik uang perlu didukung dengan adanya pendidikan politik yang lebih sistematis dan berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, tokoh agama perlu bekerja sama dengan pihak lain, seperti lembaga pendidikan dan pemerintah, untuk memperkuat kesadaran politik masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada politik uang.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi tantangan besar dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Enrekang. Masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan, sering kali terjebak dalam praktik ini karena kebutuhan ekonomi jangka pendek. Namun, nilai-nilai pendidikan agama Islam, seperti *amanah*, *adil*, dan *tanggung jawab sosial*, memiliki potensi untuk memperbaiki perilaku politik masyarakat dengan mendorong mereka untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Tantangan utama dalam implementasi nilai-nilai ini adalah rendahnya kesadaran politik dan keterbatasan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran politik berbasis agama Islam agar masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan tidak terjebak dalam politik uang

4.5. Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Politik Uang

Politik uang adalah salah satu tantangan utama dalam pemilu, termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Enrekang. Praktik ini mengancam kualitas demokrasi, merusak integritas proses pemilihan, dan mengarah pada pemilih yang lebih memprioritaskan keuntungan materi daripada memilih berdasarkan kualitas pemimpin yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, pendidikan Islam dapat memainkan peran penting dalam mengurangi dampak negatif politik uang, dengan mengajarkan masyarakat tentang nilai-nilai yang dapat memperkuat karakter dan integritas dalam menentukan pilihan politik mereka.

4.6. Menanamkan Nilai-Nilai Amanah (Kepercayaan) dalam Pendidikan Islam

Salah satu nilai utama yang diajarkan dalam pendidikan Islam adalah *amanah*, yang berarti kepercayaan atau tanggung jawab. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, nilai *amanah* mengajarkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang dapat dipercaya untuk memegang tanggung jawabnya demi kepentingan masyarakat, bukan yang hanya menawarkan imbalan materi. Pendidikan Islam menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas, kemampuan, dan komitmen terhadap kesejahteraan umat.

Pendidikan Islam yang mengajarkan nilai *amanah* dapat memotivasi pemilih untuk lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin. Alih-alih tergoda dengan tawaran materi dalam bentuk uang atau barang, pemilih yang menginternalisasi nilai *amanah* akan lebih cenderung untuk memilih calon yang memiliki visi dan program yang jelas untuk memajukan daerah dan melayani rakyat secara adil dan transparan. Dengan demikian, pendidikan agama yang mengajarkan nilai *amanah* dapat mengurangi daya tarik politik uang di kalangan pemilih.

4.7. Mendorong Kejujuran dan Keadilan dalam Menentukan Pilihan (Adil)

Nilai lain yang sangat relevan dalam pendidikan Islam untuk mengurangi politik uang adalah prinsip *adil* (keadilan). Dalam Islam, setiap individu diharapkan untuk berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam memilih pemimpin. Pemilih yang memahami konsep *adil* dalam Islam akan menyadari bahwa memilih pemimpin berdasarkan uang atau barang adalah tindakan yang tidak adil, baik terhadap calon pemimpin lainnya maupun terhadap masyarakat yang lebih luas.

Pendidikan Islam yang menekankan keadilan akan membuat masyarakat lebih sadar bahwa dalam memilih pemimpin, mereka harus mempertimbangkan kualitas pemimpin tersebut dan program yang akan dilaksanakan untuk kesejahteraan bersama. Pemilihan berdasarkan prinsip keadilan akan mendorong masyarakat untuk memilih calon yang dapat membawa kemaslahatan untuk semua, tanpa membedakan status sosial atau ekonomi. Dengan menanamkan nilai *adil* melalui pendidikan agama, masyarakat akan semakin kritis dalam menghadapi praktik politik uang dan berupaya untuk memilih secara lebih objektif.

4.8. Meningkatkan Kesadaran akan Tanggung Jawab Sosial (Responsibility)

Pendidikan Islam juga mengajarkan tentang pentingnya *tanggung jawab sosial* dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ajaran Islam yang sering ditegaskan adalah bahwa setiap

individu memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks Pilkada, pemilih yang memiliki kesadaran tinggi terhadap tanggung jawab sosial akan memilih calon pemimpin yang mampu memajukan daerah dan memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan pribadi mereka.

Pendidikan Islam yang menekankan pada nilai *tanggung jawab sosial* akan mendorong masyarakat untuk berpikir jangka panjang dan memprioritaskan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian, pemilih yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi tidak akan mudah tergoda oleh politik uang, karena mereka tahu bahwa memilih berdasarkan uang jangka pendek dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan.

4.9. Peran Tokoh Agama dan Pendidikan Formal dalam Penyebaran Nilai Islam

Tokoh agama, terutama di daerah seperti Kabupaten Enrekang yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, memainkan peran kunci dalam menyebarkan nilai-nilai pendidikan Islam yang berkaitan dengan politik. Melalui ceramah, khutbah, dan pendidikan agama, para tokoh agama dapat membimbing masyarakat untuk memahami bahwa politik uang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, pendidikan formal di sekolah-sekolah yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan pembelajaran kewarganegaraan dan etika politik dapat menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran politik sejak dini. Melalui kurikulum yang memasukkan nilai-nilai moral dan sosial Islam, diharapkan generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya memilih pemimpin yang amanah dan adil.

5.10. Pendidikan Agama Islam dan Penguatan Karakter Politik yang Berintegritas

Pendidikan agama Islam memiliki potensi besar untuk membentuk karakter politik yang berintegritas. Dengan mengajarkan nilai-nilai seperti *amanah*, *adil*, dan *tanggung jawab*, pendidikan Islam dapat menciptakan pemilih yang tidak hanya memilih berdasarkan pertimbangan pribadi atau materi, tetapi juga berdasarkan visi, integritas, dan kualitas pemimpin. Ketika masyarakat memiliki karakter yang kuat dan berintegritas, mereka akan lebih cenderung untuk menolak politik uang dan memilih pemimpin yang berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

4.11. Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Islam dalam Politik

Meskipun pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk mengurangi politik uang, tantangan terbesar dalam implementasinya adalah rendahnya kesadaran politik dan tingkat pendidikan di beberapa daerah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bagaimana memilih pemimpin yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi faktor yang memperburuk masalah ini, di mana sebagian besar pemilih lebih terfokus pada kebutuhan materi dan bantuan langsung.

Untuk itu, pendidikan agama Islam harus diperkuat dengan pendekatan yang lebih relevan terhadap kehidupan politik saat ini, seperti penyuluhan politik berbasis nilai-nilai Islam yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, kerja sama antara tokoh agama, pemerintah, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik yang berbasis pada prinsip moral dan etika Islam.

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi politik uang, terutama dengan menanamkan nilai-nilai seperti *amanah*, *adil*, dan *tanggung jawab sosial*. Melalui pendidikan agama yang mengajarkan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas dan visi untuk kemajuan daerah, daripada memilih berdasarkan imbalan materi. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sinergi antara pendidikan agama, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dalam menyebarkan pemahaman politik yang berbasis pada ajaran Islam. Tantangan terbesar adalah kesadaran politik masyarakat yang masih terbatas dan ketimpangan sosial-ekonomi, yang membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dalam memperkuat nilai-nilai pendidikan Islam dalam kehidupan politik.

4.12. Tantangan dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Meskipun pendidikan Islam memiliki potensi yang besar dalam mengurangi praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Enrekang, penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan politik sehari-hari masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari faktor internal masyarakat, tetapi juga dari

dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang berlaku di daerah tersebut. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam untuk mengatasi politik uang:

1. Ketergantungan Ekonomi pada Bantuan Politik

Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam adalah ketergantungan sebagian besar masyarakat pada bantuan politik, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Banyak pemilih yang menganggap politik uang sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang mendesak. Dalam kondisi seperti ini, meskipun mereka menyadari bahwa politik uang bertentangan dengan ajaran Islam, mereka merasa sulit untuk menolak tawaran yang datang karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit cenderung lebih terfokus pada keuntungan materi yang dapat mereka peroleh dalam jangka pendek daripada mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pilihan mereka. Dalam hal ini, pendidikan Islam yang mengajarkan nilai *amanah* (kepercayaan) dan *adil* (keadilan) harus lebih ditanamkan dalam konteks kesadaran ekonomi masyarakat, di mana mereka bisa mengaitkan prinsip-prinsip Islam dengan kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan sekadar keuntungan sesaat.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Politik

Tantangan lain yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai pendidikan Islam adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Masyarakat yang kurang teredukasi cenderung kurang paham tentang konsekuensi jangka panjang dari politik uang dan bagaimana memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan integritas, bukan berdasarkan imbalan materi.

Pendidikan agama Islam yang menekankan pentingnya memilih pemimpin yang *amanah* dan *adil* belum sepenuhnya menjangkau masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks politik lokal. Kurangnya pendidikan formal yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan kewarganegaraan dan etika politik menyebabkan masyarakat sering kali

mengabaikan pertimbangan moral dan lebih memprioritaskan keuntungan langsung yang mereka terima dari calon pemimpin.

3. Budaya Politik yang Pragmatik dan Patronase

Budaya politik yang pragmatik dan patronase merupakan tantangan besar dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam praktik politik di Kabupaten Enrekang. Politik uang sering kali dipandang sebagai bagian dari "budaya lokal" yang sudah mendarah daging. Dalam banyak kasus, pemilih menganggap bahwa memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang memberikan uang atau barang adalah bagian dari hubungan timbal balik yang wajar dan sudah menjadi bagian dari praktik politik yang telah ada sejak lama.

Pragmatisme politik ini, yang berfokus pada keuntungan materi dan hubungan patronase, menciptakan budaya yang sulit untuk digoyahkan, meskipun pendidikan Islam mengajarkan tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, mengubah pola pikir ini memerlukan waktu dan pendekatan yang lebih mendalam, termasuk perubahan dalam struktur sosial dan budaya politik yang ada.

4. Kurangnya Model Pemimpin yang Berintegritas

Salah satu tantangan utama dalam mengurangi politik uang adalah kurangnya model pemimpin yang berintegritas dan mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam praktek politik. Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Enrekang, calon kepala daerah sering kali terjebak dalam praktik politik uang sebagai cara untuk menarik dukungan pemilih. Hal ini memperburuk ketergantungan masyarakat pada imbalan materi dan membuat nilai-nilai pendidikan Islam, seperti *amanah* dan *adil*, sulit untuk diterapkan dalam kenyataan politik.

Bahkan jika nilai-nilai ini sudah ditanamkan dalam masyarakat, kurangnya figur pemimpin yang menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip Islam membuat masyarakat lebih cenderung memilih calon yang memberikan keuntungan langsung, meskipun mereka sadar bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu menciptakan lebih banyak contoh pemimpin yang berintegritas dan mampu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara nyata dalam dunia politik.

5. Keterbatasan Akses Terhadap Pendidikan dan Penyuluhan Politik

Pendidikan dan penyuluhan politik berbasis nilai-nilai Islam sering kali terbatas di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah pedesaan yang kurang mendapatkan perhatian. Penyuluhan tentang pentingnya memilih pemimpin yang amanah dan adil, serta menghindari politik uang, sering kali tidak disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, banyak pesantren atau lembaga pendidikan agama yang lebih fokus pada aspek ibadah dan spiritualitas, sementara pendidikan kewarganegaraan dan politik berbasis nilai-nilai Islam kurang mendapat perhatian.

Untuk itu, perlu ada upaya untuk memperluas penyuluhan politik yang berbasis nilai-nilai Islam melalui berbagai saluran, baik di tingkat pendidikan formal, informal, maupun melalui ceramah dan khutbah agama. Penyuluhan ini perlu disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi sosial-politik yang ada, agar masyarakat dapat melihat hubungan antara ajaran Islam dan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas.

6. Pengaruh Media Sosial dan Propaganda Politik

Media sosial dan berbagai platform digital saat ini memainkan peran besar dalam membentuk opini politik masyarakat, termasuk dalam Pilkada. Namun, media sosial juga dapat menjadi alat yang digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah atau manipulatif, termasuk dalam bentuk politik uang. Calon kepala daerah yang menawarkan uang atau barang melalui media sosial sering kali berhasil menjangkau pemilih dengan cara yang lebih cepat dan efektif.

Pendidikan Islam yang menekankan pentingnya memilih pemimpin yang amanah dan adil perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi yang benar dan mencerahkan masyarakat tentang bahaya politik uang. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana mengubah cara penyampaian nilai-nilai Islam agar lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan media sosial yang ada.

Tantangan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam untuk mengurangi praktik politik uang di Kabupaten Enrekang sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Tantangan tersebut mencakup ketergantungan ekonomi masyarakat pada bantuan politik, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik, budaya politik pragmatik

dan patronase, kurangnya contoh pemimpin yang berintegritas, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan penyuluhan politik, serta pengaruh media sosial yang dapat mempermudah penyebaran praktik politik uang.

Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman politik berbasis nilai-nilai Islam, menciptakan contoh pemimpin yang berintegritas, dan memperluas akses pendidikan politik yang dapat membekali masyarakat dengan pengetahuan dan kesadaran untuk membuat pilihan politik yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab

V. Kesimpulan Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perspektif masyarakat Kabupaten Enrekang terhadap politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta telaah terhadap konstruksi nilai-nilai pendidikan agama Islam, dapat disimpulkan beberapa hal penting yang menggambarkan tantangan dan potensi pendidikan Islam dalam mengurangi praktik politik uang.

5.1. Pandangan Masyarakat terhadap Politik Uang

Sebagian besar masyarakat Enrekang menyadari bahwa praktik politik uang dalam Pilkada merupakan fenomena yang merusak kualitas demokrasi. Meskipun mereka mengakui bahwa politik uang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, banyak pemilih yang merasa terpaksa menerima imbalan materi dari calon pemimpin karena tekanan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada bantuan politik masih sangat kuat, terutama di kalangan masyarakat yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi yang lebih rendah. Namun, terdapat juga segmen masyarakat yang mulai menentang praktik politik uang dan lebih memilih untuk memilih calon berdasarkan kualitas dan komitmen mereka untuk memajukan daerah.

5.2. Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Politik Uang

Pendidikan agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi pengaruh politik uang. Nilai-nilai Islam seperti *amanah* (kepercayaan), *adil* (keadilan), dan *tanggung jawab sosial* dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas dan visi jangka panjang untuk kemajuan daerah, bukan

berdasarkan keuntungan materi sesaat. Pendidikan Islam yang mengajarkan nilai-nilai ini dapat membantu masyarakat untuk memilih dengan pertimbangan moral dan etika yang lebih kuat, sehingga politik uang dapat berkurang.

5.3. Tantangan dalam Implementasi Nilai-Nilai Islam

Meskipun nilai-nilai Islam menawarkan solusi untuk mengurangi politik uang, penerapannya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan terbesar adalah ketergantungan ekonomi masyarakat pada bantuan materi yang diberikan oleh calon kepala daerah, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, budaya politik pragmatik dan patronase yang mengakar kuat membuat masyarakat sulit untuk mengubah pola pikir mereka dalam memilih pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang lebih adil dan amanah. Kurangnya contoh pemimpin yang berintegritas dan keterbatasan akses terhadap pendidikan politik berbasis agama juga menjadi kendala dalam upaya mengurangi politik uang.

5.4. Peran Tokoh Agama dan Pendidikan Formal

Tokoh agama memegang peranan kunci dalam menyebarkan nilai-nilai pendidikan Islam terkait politik yang berbasis pada keadilan dan integritas. Melalui ceramah, khutbah, dan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan, mereka dapat membimbing masyarakat untuk memahami bahwa memilih pemimpin berdasarkan uang atau barang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan amanah. Pendidikan formal yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan pendidikan kewarganegaraan juga dapat membantu memperkuat kesadaran politik masyarakat mengenai pentingnya memilih pemimpin yang mampu membawa kemaslahatan bagi semua pihak.

5.5. Solusi untuk Mengatasi Politik Uang

Untuk mengurangi praktik politik uang, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Peningkatan kesadaran politik berbasis pada nilai-nilai Islam harus dilakukan melalui pendidikan agama yang lebih relevan dengan konteks sosial-politik saat ini. Selain itu, perlu ada peran aktif dari pemerintah, tokoh agama, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan politik yang bersih dari politik uang. Penyuluhan politik berbasis nilai-nilai agama yang disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan relevan dengan kondisi sosial

masyarakat dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih mengutamakan integritas dan kualitas pemimpin dalam proses pemilihan.

5.6. Harapan untuk Masa Depan

Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, harapan untuk mengurangi politik uang di Kabupaten Enrekang masih ada, terutama dengan adanya kolaborasi antara pendidikan Islam, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Jika nilai-nilai pendidikan Islam terus disosialisasikan dan diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, serta kesadaran politik masyarakat meningkat, maka politik uang dapat dikurangi, dan kualitas demokrasi di Kabupaten Enrekang akan semakin membaik.

Dengan demikian, meskipun tantangan dalam mengurangi politik uang cukup besar, peran pendidikan Islam sebagai landasan moral dan etika dalam pemilihan kepala daerah sangat penting. Pendidikan agama Islam yang menekankan nilai-nilai *amanah*, *adil*, dan *tanggung jawab sosial* dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mampu memperjuangkan kesejahteraan bersama dan bukan berdasarkan keuntungan pribadi sesaat

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an al-Karim. (2010). *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
2. Al-Maududi, S. A. (2003). *Islamic Way of Life*. Lahore: Islamic Publications.
3. Giddens, A. (2006). *Sociology: A Brief Introduction*. 5th ed. New York: Polity Press.
4. Hasan, M. (2015). *Politik Uang dalam Demokrasi Indonesia: Perspektif Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
5. Mulyana, D. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi: Perspektif Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
6. Nasution, H. (2017). *Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Karakter Bangsa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
7. Siregar, S. (2019). *Politik Uang dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3M Universitas Negeri Jakarta.
8. Syamsuddin, A. (2020). *Pendidikan Islam dan Politik di Indonesia*. Makassar: Alauddin Press.
9. Wibowo, A. (2013). *Politik dan Etika: Sebuah Kajian Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana.
10. Zaki, M. (2018). *Keadilan dalam Perspektif Islam: Implikasinya dalam Politik*. Bandung: Penerbit Al-Mizan.

11. Shihab, Q. (2011). *Islam dan Politik: Suatu Kajian tentang Integritas Pemimpin dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Lentera Hati.
12. Wahyudin, M. (2017). *Budaya Politik Indonesia: Perspektif Sosial dan Agama*. Surabaya: Sinar Grafika.